

KATEKIS PROFESIONAL DI TENGAH KONSTELASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Keristian Dahurandi

Abstract:

Now, we are in Asean Economic society. It means every man is demanded to improve him/herself, undergoing severe training as a competitive person in order to not be marginalized in MEA. Catehist as the part of society is also included in this insist. So, the catechists must perform theirself competitively and professionally. As a professional, chatechist must have the standard of expert and certain competency in running their profession. The consequences of profession is contract of employment, namely doing the job in compliance with minimal demand rewarded and decided standard. Beside it, pastoral as a profession has etihier inside or outside competition. The outside competitions such as the the better capability and skill.

Through this article, Christian Dahurandi presents the ideal concept about the ideal, professional and competitive chatechist in coping with MEA. At least, the writer suggests that in relation with inside competition, pastoral agent must competitive and creative in obtaining the job opportunity. The pastoral profession will face the global market context that current to free trade are in MEA asociation.

Key Words: Asean Economics Society, Chatechist, Competitive and Professional

I. PENDAHULUAN

Katekis adalah seorang profesional yang secara khusus melaksanakan kegiatan pastoral atau kegembaan di tengah Gereja dan dalam tata dunia. Sebagai seorang profesional, katekis menuntut standar keahlian dan kompetensi tertentu untuk melakukan bidang profesinya di tengah tata dunia. Konsekuensi dari profesi adalah kontrak kerja, yaitu melakukan pekerjaan (pastoral) sesuai tuntutan minimal yang di-*reward* (dihargai) sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, pastoral sebagai suatu profesi harus menuntut persaingan (kompetisi) ke dalam dan keluar bidang profesi. Kompetisi ke luar berupa kemampuan dan keterampilan lebih agar terserap pasar. Dalam kaitan dengan kompetisi ke dalam, agen pastoral harus bersaing dan kreatif untuk merebut peluang kerja yang terbatas. Profesi pastoral berhadapan

dengan konteks pasar global yang terarah pada pemberlakuan pasar bebas (*free trade area*) dalam asosiasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berhadapan dengan fakta ini, muncul pertanyaan: katekis yang bagaimana yang harus diidealkan dalam konteks MEA? Tulisan ini hendak menguraikan jawaban terhadap pertanyaan ini.

II. DUALISME MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

2.1. Idealisme Masyarakat Ekonomi Asia

Secara umum, masyarakat ekonomi ASEAN diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain (maksudnya antara negara yang satu dengan yang lain dalam lingkup ASEAN) dengan adanya perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN sehingga dapat menyaingi Negara lain yang sekarang ini sedang berkembang pesat seperti Cina dan India dalam hal menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini memungkinkan penjualan barang dan jasa dapat dengan mudah melintasi batas-batas negara di seluruh Asia Tenggara¹.

Berdasarkan pemahaman MEA di atas, terdapat empat hal menjadi fokus MEA² yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. *Pertama*, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen

1 <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/overview-10>.

2 Arya Baskoro dalam <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi>

perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, MEA meningkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Singkatnya, MEA adalah kondisi pasar global tunggal antar Negara ASEAN tanpa proteksi dan *double taxation* untuk demi memudahkan aliran barang dan jasa lintas Negara. Sebagai sebuah pasar, aliran barang dan jasa antar Negara dalam pasar tunggal tersebut ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Konsekuensinya, kompetensi dan kualitas barang dan jasa tersebut semakin kompetitif.

2.2. MEA: Rekonsepsi Paradigma Pembangunan Modernisme

2.2.1. Hakikat Paradigma Pembangunan Modernisme

MEA adalah salah satu alternatif yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mencita-citakan kemakmuran negara berbasis ekonomi. Paradigma pembangunan seperti ini tidak terlepas dari pandangan modernisme. Paradigma modernisme berkaitan dengan aliran filsafat positivisme³. Teori modernisasi berkembang pada tahun 1950-an di Amerika Serikat dan merupakan respons kaum intelektual terhadap perang dunia yang

³ N. Hertz, *Membunuh Atas Nama Kebebasan, The Silent Takeover, Kapitalisme Global Dan Kematian Demokrasi* (Bandung: Nuansa, 2004), p. 40.

bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Modernisasi menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Teori ini lahir dalam suasana ketika memasuki perang dingin antara negara-negara komunis dengan negara-negara Sosialis Uni Soviet Rusia (USSR). Perang dingin merupakan bentuk peperangan ideologi dan teori antara kapitalisme dan sosialisme⁴.

Ideologi ekonomi kapitalisme bersumber dan berakar pada pandangan filsafat ekonomi klasik, terutama ajaran Adam Smith yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Wealth of Nation* (1776). Selain Smith, tokoh perintis yang lain adalah David Richardo dan James Mill. Inti pemikiran liberalisme ekonomi klasik adalah pengembangan ekonomi yang berbasiskan kehendak bebas (*free will/laissez-faire*), ekonomi pasar *supplay creates its own demand*, *full employment*, *harmony of interest* dan industri. Mereka yakin bahwa prinsip ini berlaku secara universal pada apa, di mana dan kapan saja. Prinsip ini secara mendasar menekankan kebebasan individu untuk mengembangkan dan meningkatkan kehidupan ekonominya. Negara tidak boleh mencampuri atau menghalangi usaha individual ini sebaliknya negara harus menciptakan kebijakan yang mendukung kebebasan individual (*free will*) untuk mewujudkan suatu negara yang makmur dan sejahtera⁵.

Prinsip kapitalisme ini mendapat kritikan dari aliran ekonomi sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx. Secara umum pandangan sosialis tidak menyetujui kehendak bebas (*free will/laissez-faire*), ekonomi pasar (*supplay creates its own demand*), *full employment*, *harmony of interest* dan industri. Kebebasan yang sebesar-besarnya bagi individu untuk mengembangkan kehidupan ekonomi dapat membawa dampak ketidakadilan sosial. Kebebasan yang penuh kepada individu tanpa campur tangan pemerintah dapat menyebabkan orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Konsekuensinya, orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin. Secara khusus kritik sosial ini terdapat dalam pandangan Karl Marx tentang pertentangan kelas antara borjuis dan kaum buruh (proletar). Dia menegaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis dapat menciptakan pertentangan kelas. Perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan upah kaum

4 *Ibid.*, p. 41.

5 Mohamad Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002), p. 45-46.

buruh serendah-rendahnya menyebabkan kaum buruh bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Mereka teralienasi dari pekerjaannya. Atas dasar itu, mekanisme pasar tidak boleh berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Bangkitnya negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika yang tadinya merupakan jajahan negara-negara Eropa dan Amerika menjadi ancaman baru karena banyak di antara mereka tertarik dengan sosialisme sebagai cara untuk melakukan perubahan sosial. Amerika Serikat menyadari akan situasi ini sehingga mereka mendorong para ilmuwan sosial untuk mengembangkan teori untuk memahami Dunia Ketiga yang baru lahir, juga menemukan resep teoretik dalam rangka membendung sosialisme untuk mendorong kapitalisme. Dalam konteks sejarah seperti inilah teori-teori modernisasi dan pembangunan muncul mendukung ideologi kapitalisme.

Teori modernisasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan sosial dalam perjalanannya telah menjadi sebuah ideologi. Perkembangan ini adalah akibat dari dukungan dana dan politik yang luar biasa besarnya dari pemerintah dan organisasi maupun perusahaan swasta di Amerika Serikat serta negara-negara liberal lainnya. Semuanya itu menjadikan modernisasi dan pembangunan sebagai suatu gerakan ilmuwan yang antar disiplin ilmu-ilmu sosial memfokuskan kajian terhadap perubahan sosial di dunia ketiga. Akibatnya, teori modernisasi bukan hanya sekedar industri yang sedang bertumbuh tetapi telah menjadi sebuah pemikiran (*a school of thought*) bahkan telah menjadi sebuah ideologi⁶.

Modernisasi sebagai gerakan sosial sesungguhnya bersifat revolusioner (perubahan yang cepat dari tradisi klasik ke modern). Pandangan ini sangat kuat terdapat pada teori pertumbuhan W. W. Rostow dalam tulisannya yang berjudul *The stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Rostow menegaskan bahwa pertumbuhan yang disebut pembangunan terjadi apabila ada perubahan dari sistem masyarakat tradisional menuju masyarakat industri. Industri dianggap sebagai puncak peradaban manusia. Karena itu, kemajuan ditakar dengan proses produksi barang dan jasa dan pemasarannya yang didorong oleh penggunaan teknologi yang mutakhir. Teori pertumbuhan seperti ini muncul dalam konteks pemikiran materialisme historis yang mendasarkan keberadaan manusia pada aspek ekonomis.

6 Fakih, M. *Op. Cit.* p. 53-54.

Selain itu, modernisasi juga berwatak kompleks (melalui banyak cara dan disiplin ilmu), sistematis, menjadi gerakan global yang akan mempengaruhi semua manusia, melalui proses yang bertahap menuju suatu homogenisasi (*convergency*) dan bersifat progresif. Teori ini dipergunakan dalam berbagai kalangan interdisiplin, sehingga lahirlah aliran modernisasi dalam sosiologi, psikologi, pendidikan, ekonomi, antropologi, dan bahkan agama. Dalam kenyatannya di dunia akademik penggunaan istilah modernisasi sering ditukarbalikan dengan istilah pembangunan (*development*). Itulah sebabnya modernisasi dan pembangunan dijadikan satu aliran dalam diskursus ini.

Selain teori pertumbuhan Rostow, teori modernisasi yang sangat berpengaruh dalam konteks pembangunan adalah teori Mc Clelland tentang motivasi. Jika teori Rostow lebih merupakan teori ekonomi, teori modernisasi Mc Clelland berangkat dari psikologi sosial. Dalam bukunya yang berjudul *The Achievement motive in Economic Growth* (1984), Mc Clelland sangat tertarik dengan tesis etika protestan Max Weber yang menjadi pendorong pertumbuhan di negara-negara barat. Analog yang sama juga dipakai Mc Clelland untuk merefleksikan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya rahasia pikiran Max Weber tentang etika protestan adalah *need of achievement* (*N'ach*). Alasan mengapa rakyat dunia ketiga terkebelakang menurutnya karena rendahnya *need for achievement*. Sikap dan budaya manusia dianggap sebagai sumber masalah dan *prototipe the achieving society* yang menjadi inspirasi bagi ciri-ciri watak dan motivasi masyarakat kapitalis⁷.

Singkatnya, teori-teori modernisme hendak menekankan manusia sebagai pusat pembangunan masyarakat. Modernistas memberi ruang kebebasan penuh kepada manusia untuk mengelola alam dunia ini untuk kesejahteraan dan kemakmurannya. Kesejahteraan tidak tergantung pada faktor eksternal seperti proteksi atau perlindungan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Negara terhadap pembangunan masyarakatnya. Kesejahteraan juga tidak akan diperoleh melalui kondisi sosial yang direayasa untuk mengatur kecenderungan pribadi untuk mengaktualisasikan kehendak ekonomisnya. Atas dasar itu, manusia adalah tuan atas aktivitas ekonomisnya, sehingga setiap orang diberi kebebasan penuh untuk melakukan tindakan ekonomisnya (*free will*). Pandangan modern ini sungguh yakin bahwa hal ini dapat mendorong *N'ach* sebagaimana dikemukakan oleh Mc Clelland di atas. Teori-teori ini mendorong berkembangnya sistem kapitalisme sehingga

⁷ Fakih, M. *Op. Cit.*, p. 57-62.

para pemikir selanjutnya menyebut paradigma berpikir seperti ini sebagai neoliberalisme.

2.2.2. MEA: Rekonsepsi Neoliberalisme?

Asumsi dalam pandangan liberalisme atau pandangan ekonomi klasik, individu diberi kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengembangkan kehidupan ekonominya. Negara berhak untuk mendukung dan melindungi usaha individual melalui kebijakan proteksi. Pandangan ekonomi klasik atau liberalisme yang berfokus pada kebebasan individu (*free will*) disempurnakan dalam bentuk gagasan modern disebut sebagai neoliberalisme. Rostow adalah penggagas neoliberalisme sebagai ide-ide sistematis. Gagasan ini tertuang dalam teori pertumbuhan. Pandangan ini kemudian secara sistematis disempurnakan oleh para ekonom mazhab Freiburger. Perbedaan yang paling mendasar dengan liberalisme klasik adalah konsepsi pembentukan harga pasar. Menurut ekonomi klasik harga pasar yang ternyata tidak bersifat alami, melainkan memerlukan campur tangan negara, sedangkan neoliberalisme menentang tarif dan non tarif yang menghalangi mekanisme pasar⁸.

Para ekonom neoliberalisme menentang pendapat bahwa negara-negara berkembang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Krisis yang menimpa negara-negara berkembang bukan kesalahan pemerintah ataupun kegagalan pasar (*market failure*). Kemiskinan negara-negara dunia ketiga akan mendapat solusi apabila terdapat intervensi dan bantuan luar negeri yang sangat besar. Selain itu, solusi lainnya adalah negara harus melepaskan diri dari kehidupan ekonomi yang terbatas. Negara harus membuat kebijakan yang pro-pasar dan membuka pasarnya bagi dunia sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercipta dan kesejahteraan nasional akan tercapai secara mutlak.

Ciri khas neoliberalisme adalah kebebasan individu (*free will*) yang berlanjut pada perdagangan bebas (*free trade*) untuk mendukung mekanisme pasar. Perlu dicatat, maksud neoliberalisme adalah mekanisme pasar bisa segera terbentuk dan proses operasionalnya tidak dirintangi oleh faktor kelembagaan (seperti pranata sosial)⁹. Neoliberalisme muncul sebagai paradigma berpikir yang dapat menghilangkan tindakan protektif setiap negara untuk bersaing secara bebas pada pasar global.

8 M. D. Navis, *Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme Atas Daulat Rakyat* (Jakarta: Inside Press, 2009). pp. 42-43.

9 M. D. Navis, *Op., Cit.*, p. 17.

Secara historis, pada penutupan abad 20 dan pembukaan abad 21 di berbagai negara di dunia muncul berbagai kesepakatan *Regional Trades Agreements (RTAs)* akan adanya perdagangan bebas dalam konteks regional tertentu. Persetujuan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam aspek ekonomis. Persetujuan bersama (*RTAs*) merupakan peralihan dari paradigma ekonomi klasik yang mengasumsikan bahwa pasar secara alamiah timbul dari hasrat manusia untuk berdagang. Ekonomi klasik mengasumsikan pasar secara spontan dilahirkan dari aktivitas menjual dan membeli antara produsen dan konsumen¹⁰.

Bentuk aplikatif dari noeliberalisme adalah munculnya banyak *Regional Trades Agreements (RTAs)* pada akhir abad 20 dan awal abad 21. *Regional Trades Agreements (RTAs)* adalah bentuk kesepakatan secara regional untuk melakukan perdagangan bebas antara negara yang menjadi anggotanya. Ada berbagai bentuk kesepakatan yang dibuat oleh setiap anggotanya. Kesepakatan berkaitan dengan pasar modal, hasil produksi dan tenaga kerja. *Regional Trades Agreements (RTAs)* dibentuk untuk meminimalisasi intervensi politik dalam kebijakan ekonomi. Secara umum *Regional Trades Agreements (RTAs)* dapat diringkas dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Ringkasan *Regional Trades Agreements (RTAs)*

No	Name	Members (2004)	Elements Of The Economy	Progres To Date	Key Additional Dimensions
1	EU (1957) Common Market	Austria, Belgyum, Cyprus, The Chzech Republik, Denmark, Estonia, Findland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungaria, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden	Goods, services, capital and labor	Mostly complete, especially with goods	Monetary union, foreign policy, internal security cooperation

10 Abolafia, M. *Making Markets: Opportunities and Restraint on Wall Street* (Cambridge: Harvard University Press, 1996), p.9.

2	Mercosur (1991) Common Market	Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay Associate Members: Bolivia and Chile	Goods, services, capital and labor Important exceptions in goods include the automotive and sugar sectors	Significant, especially with goods; common external tariff planned for 2006	
3	NAFTA (1993) & Side Agreements on Labor & the environment <i>Free Trade Area</i>	Canada, Mexico, United States	All Goods, selected services, all capital, no labor	Significant, especially with goods	
4	AFTA (1992) & Associated Services and Investments Agreements <i>Free Trade Area</i>	Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, The Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam	All goods, services, and most capital Important exceptions in goods include unprocessed agriculture products and slow progress with rice and sugar; in investments are exempted	Fair in goods for tariffs through poor for non tariff barriers; poor in services and capital	In the context of ASEAN, agreements on security, crime, preventive diplomacy, transportation, and other areas
5	SADC Protocol on Trade (1999) <i>Free Trade Area</i>	Angola, Botswana, The Democratic Republic of Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe	Goods and Services	Progress on liberalization of Goods; difficulties with services and with ratification of protocol by all member states	Various agreements on political cooperation, energy, crime, natural resources and other areas

Sumber: Vision of Free Trade dalam (<http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=171>)

Tabel di atas membeberkan bentuk-bentuk kesepakatan yang memberi ruang yang besar dan luas pada upaya untuk menghidupkan kembali liberalisme dalam pembangunan. Salah satu bentuk dari konsep *Free Trade Area* adalah kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN. Konsep MEA sebenarnya konsep yang sudah dirancang saat membentuk organisasi ASEAN. Visi ini baru secara eksplisit dihayati sekarang ini dengan cara penghapusan segala bentuk hambatan kelembagaan seperti proteksi atau *double taxation*.

Singkatnya, tabel di atas hendak menunjukkan bahwa berbagai Negara sudah mengakui secara rasional bahwa perdagangan bebas (*free trade*) adalah alat pendorong utama bagi percepatan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pembangunan itu pun diukur dari tingkat produksi dan konsumsi barang dan jasa. Dengan demikian, MEA adalah wadah pengembangan konsep pembangunan negara berasaskan neoliberalisme.

3. PROFESI PASTORAL DALAM KONTEKS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

MEA adalah salah satu konteks atau "pasar" bagi profesi pastoral katekis. Sebagai suatu konteks, MEA tidak dapat dihindarkan dan dihindari dari sistem pemikiran yang optimis dengan perspektif pembangunan bangsa (*nation-building*) berdasarkan perspektif ekonomis. Atas dasar itu, bidang pastoral juga harus direkonsepsi sehingga dapat masuk dalam tataran profesi sebagaimana dituntut dalam mekanisme pasar tunggal MEA. Bagian ini menguraikan tentang profesi pastoral dalam konteks MEA.

3.1. Esensi Profesi dalam Pandangan Modernisme

Secara etimologis, profesi berasal dari kata *profess* yang berarti "meneruskan sesuatu". Penggunaan dasar kata ini memiliki makna religius yang merujuk pada kaul kebiaraan namun dalam perkembangannya makna ini mengalami arti sekular¹¹. Profesi pada masyarakat modern menempati kedudukan yang strategis sebagaimana dikatakan oleh Talcott Parson: *profession occupy a position of importance in our society which is, ... in unique in history* atau dikategorikan pada "it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired".¹² Pernyataan Parson ini hendak menegaskan bahwa profesi menempati posisi yang penting dan istimewa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, tidak setiap pekerjaan dan kegiatan bisa dilakukan oleh seseorang. Hal ini disebut sebagai profesi.

Profesi dalam konteks dunia modern memiliki beberapa ciri: *pertama*, mensyaratkan pelatihan ekstensif yang disebut pendidikan profesi; *kedua*, pelatihan yang meliputi komponen intelektual; *ketiga*, tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat; *keempat*, adanya

11 Richard M. Gula, *Etika Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), p. 20.

12 Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing), p. 82.

proses lisensi atau sertifikat; *kelima*, adanya organisasi; dan *keenam*, otonomi dalam pekerjaannya¹³.

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka ada beberapa unsur profesi, yaitu¹⁴: *pertama*, suatu kegiatan (pekerjaan) yang bersifat tetap (keabadian) atau kontinuitas (berkelanjutan), tidak temporer dan tidak berubah-ubah; *kedua*, pekerjaan itu berorientasi profit (bayaran uang) atau imbalan yang tinggi sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang bersedia membayar; *ketiga*, pekerjaan itu dilaksanakan sesuai keahlian dan bukan asal-asalan, menunjukkan dan menghasilkan karya yang dihargai (dinilai); *keempat*, pekerjaan itu diperoleh atau digodok berkat binaan suatu lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada bidang-bidang tertentu, yang diikuti pelatihan-pelatihan secara intensif.

3.2. Profesi Pastoral versus Profesi Modern

Untuk mengetahui esensi profesi pastoral, bagian memnguraikan perbedaan profesi modern dan profesi pastoral. Perbedaan itu adaah sebagai berikut:

Pertama, profesi modern mendasarkan aktivitas atau pelaksanaan profesinya pada **standar minimal** yang dikemas dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan kumpulan asas yang dapat menjadi standar minimal pelaksanaan profesi untuk mendorong pertanggungjawaban secara sosial bagi pelaksana profesi tersebut¹⁵. Sebaliknya, dalam etika profesi pastoral, katekis tidak hanya melaksanakan tugas profetisnya sebatas standar minimal melainkan harus melaksanakannya semaksimal mungkin. Dengan demikian, prinsip utama pelayanan yang baik dalam aktivitas pastoral adalah melakukan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya yang disebut sebagai **standar maksimal** (*pro Deo*)¹⁶.

Kedua, tanggung jawab etika profesi modern bersifat **sosial**. Suatu profesi dikatakan baik apabila dapat dipertanggungjawabkan sesuai asas atau kode etik kepada atasan dan kepada masyarakat sebagai obyek pelayanan¹⁷. Sebaliknya, etika profesi katekis mendasarkan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tanggung jawab ini disebut **tanggung jawab transendental**.

13 *Ibid.*, pp. 55-88.

14 *Ibid.* p. 89.

15 Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin., *Op. Cit.*, p. 95.

16 Richard M. Gula., *Op. Cit.*, p. 21.

17 Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin., *Op. Cit.*, p. 89

Aktivitas pastoral katekis tidak dibatasi oleh pengakuan sosial melainkan tertuju pada pengakuan Tuhan sebagai sumber keselamatan kekal bagi pelaksana profesi. Atas dasar itu, profesi pastoral tidak sekedar menjalankan profesi sesuai dengan standar minimal seperti yang ditekankan dalam kode etik profesi modern, melainkan melakukan profesinya semaksimal mungkin untuk mendapatkan rahmat Tuhan sebanyak-banyaknya (*blessing in disguise*). Rahmat Tuhan yang bersifat cuma-cuma (*Deo Gratias*) itu mesti didapatkan melalui aktivitas manusia yang tanpa pamrih yang diejawantahkan dalam bentuk penyebaran rahmat itu secara cuma-cuma pula kepada sesama manusia¹⁸.

Ketiga, dari perspektif relasi, relasi kerja dalam etika profesi modern adalah **relasi "kontrak"**. Relasi kontrak mendasarkan relasi pada orientasi profit (pertimbangan untung-rugi). Untuk menata pertimbangan itu agar sama-sama menguntungkan, kedua belah pihak harus membuat kesepakatan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*). MoU adalah standar penilaian suatu pekerjaan prihal apakah pekerjaan itu dilanjutkan atau diberhentikan, di-*reward* atau diberi sanksi. Berbeda dari konsep tersebut, dalam etika profesi katekis, relasi yang terjalin antara katekis dengan orang atau masyarakat yang dilayani didasarkan pada **semangat perjanjian**. Konsep perjanjian dalam profesi pastoral mengandung semangat cinta kasih Kristiani¹⁹.

Cinta kasih Kristiani dalam konsep perjanjian merupakan refleksi biblis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena cinta-Nya yang Mahadasyat, Allah tetap mencintai Bangsa Israel sekalipun bangsa ini selalu menyangkal keberadaan Allah "bersinah" (penyembahan berhala). Bukti cinta Allah itu dinyatakan dalam berbagai bentuk seperti dekalog yang diberikan Allah melalui Musa di gunung Sinai untuk mengatur kehidupan Bangsa Israel agar mendapatkan keselamatan Yahwe. Cinta Allah ini mencapai puncak dalam peristiwa inkarnasi, Allah yang menjadi Daging dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia telah menunjukkan kedalaman cinta-Nya (*agape*) melalui peristiwa salib (*via dolorosa*). Kesejatian cinta Allah ini dinyatakan dalam pengorbanan diri Yesus secara total untuk menebus dosa manusia (Yoh 3:16).

Semangat cinta Kristus seperti ini merupakan dasar pijakan aktivitas

18 Richard M. Gula, *Op. Cit.*, p. 21.

19 *Ibid.*

profesi pastoral semua pengikutnya, khususnya katekis. Tindakan profesional katekis yang diresapi oleh semangat perjanjian ini dapat mendorong pelayanan "tanpa syarat atau tanpa pamrih". Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep kontrak yang secara eksplisit dan akurat mempertimbangkan hitungan profit dalam menjalankan profesi.

Kelima, etika profesi modern dilaksanakan atas dasar **ketidakpercayaan**. Hal ini dibuktikan dengan adanya kontrak yang diderivasi dalam bentuk-bentuk kesepakatan yang jelas, akurat dan penuh pertimbangan untung rugi. Dasar dari kesepakatan ini adalah meminimalisasi kecenderungan manusiawi yang sering tidak konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dinyatakannya²⁰. Berbeda dengan aktivitas profesi modern, dasar aktivitas profesi pastoral adalah **saling percaya**. Kepercayaan itu diberikan karena tanggung jawab pastoral yang dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab transedental. Tanggung jawab demikian dapat mendorong pelaksanaan profesional secara maksimal meskipun tanpa upah atau pamrih. Pelaksanaan profesi secara maksimal secara implisit mengandung tanggung jawab yang maksimal untuk menjalankan profesi semaksimal mungkin. Tanpa sarat apa-apa, profesi tetap dilakukan secara maksimal²¹.

IV. KATEKIS PROFESIONAL DALAM KONTEKS MEA

MEA dan panggilan seorang katekis cukup bertentangan dari perspektif tujuan dan aksentuasi semangat dasar profesional. MEA sangat optimis bahwa kesejahteraan umat manusia (negara) dapat dicapai melalui usaha ekonomi produktif. Untuk mencapai hal tersebut, setiap Negara harus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda dari hal tersebut, kesejahteraan dalam pelayanan pastoral lebih berfokus pada kesejahteraan manusia secara spiritual. Kesejahteraan spiritual ini dianggap sebagai kesejahteraan yang sejati yang dapat menjiwai dimensi jasmaniah manusia. Sekalipun demikian, keduanya sama-sama berupaya untuk mengabdikan kepada masyarakat yakni mengusahakan kesejahteraan manusia. Untuk itu, berhadapan dengan dua profesi ini, seorang katekis perlu memiliki beberapa kompetensi berikut dalam aktivitas profesi pastoralnya.

20 Bdk. Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin., *Op. Cit.*, p. 95.

21 Richard M. Gula., *Op. Cit.*, p. 22

4.1. Katekis Kompetitif-Perjanjian

Visi MEA adalah kesejahteraan yang tercapai melalui aspek ekonomis. Visi ekonomis tersebut secara implisit merupakan rekonsepsi teori Karl Max yang menekankan materialisme historis. Hal ini dibuktikan dengan konsep kesejahteraan Negara yang bersandar pada proses ekonomi. Salah satu upaya untuk memenuhi konsep materialisme dalam pembangunan bangsa-bangsa ASEAN adalah MEA.

Salah satu prinsip mendasar dalam konteks MEA adalah keharusan untuk berkompetisi. Kompetisi berarti bersaing dengan pihak lain dalam hal produksi barang dan jasa agar mendapatkan banyak permintaan pasar. Persaingan dalam kompetisi ini lebih mengacu pada penciptaan ruang bagi konsumen untuk memakai barang dan jasa yang ditawarkan seseorang atau sekelompok orang lebih baik dari orang atau kelompok lainnya. Karena itu, ada banyak hal yang harus diciptakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kreativitas, kompetensi dan keterampilan sangat dibutuhkan untuk bergulat dengan situasi kompetitif tersebut.

Persaingan atau kompetisi menuntut sikap menjadikan diri lebih tinggi dari yang lain agar nilai jual saya lebih tinggi dari yang lain. Semangat persaingan dalam dunia yang penuh kompetisi secara ekonomis dapat memusatkan perhatian pada pertimbangan untung rugi. Dengan demikian, semangat kontrak harus lebih kuat untuk mengatasi kesalahan dalam perhitungan ekonomis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menguasai pasar.

Konteks kompetisi dalam kebijakan MEA bukanlah hal yang buruk. Kekuatan peluang dan tantangan dalam kebijakan ini sama-sama memberikan pengaruh yang sama bagi para agen-agennya. Konteks yang kompetitif ini adalah tata dunia yang ada dan riil dalam konteks MEA sebagai bagian dari konteks yang seharusnya (*condition sine qua non*). Perikat sikap kompetitif ini adalah paradigma kontrak. Paradigma ini sangat diperlukan dalam konteks MEA agar tidak ada yang tergerus oleh aliran pasar. Semangat kontrak membuka peluang sikap egois yang mendorong seseorang untuk mengobyeikan atau mengeksploitasi dan merekayasa orang lain demi keuntungan diri sendiri²².

²² Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.), p. 8.

Apakah hal ini sinkron dengan etika profesi katekis? Tentu saja perspektif ekonomis yang dijiwai oleh pemahaman kontrak bertentangan dengan konsep etika profesi katekis yang mengedepankan konsep perjanjian. Paham perjanjian dalam konteks kontrak dipandang sebagai aktivitas yang tidak efektif dan efisien. Prinsip efektif dan efisien menekankan penggunaan daya yang minim untuk mencapai hasil yang besar. Sebaliknya dalam prinsip perjanjian, penekanan utama pada *input* yang besar tanpa mempertimbangkan hasil. Dengan demikian, paradigma perjanjian yang mengeluarkan daya yang besar (semaksimal mungkin) untuk mendapatkan hasil yang besar dipandang sebagai pemborosan dan masuk dalam kategori tidak efektif dan efisien.

Bagaimana seorang katekis bisa eksis dalam konteks MEA yang berparadigma berpikir yang bertolak belakang dengan sipiritualitas panggilannya? Perbedaan perspektif ini tidak berarti bahwa kedua hal ini tidak bisa didamaikan. Seorang katekis harus mampu menjadi orang yang bersaing tetapi juga tetap menghayati konsep perjanjian. Katekis sebagai orang yang ada dalam tata dunia mesti menyiapkan diri dengan baik terutama kompetensi dan keterampilan (*skill*) yang tinggi agar mampu bersaing dalam konteks pasar. Dengan demikian, pola lama yang memaksa pasar untuk menerima pelayanan katekis tidak lagi diharapkan karena dalam konteks MEA, permintaan pasar yang membuktikan bahwa katekis tersebut berkompeten dan ahli dalam profesinya (bdk. EN. No 14,18). Hal ini memang cukup sulit di tengah situasi pasar yang "mengayubahagiakan" *basic need* (sandang, padangan papan). Sekalipun demikian, konteks MEA dapat mendorong agar katekis memiliki nilai jual yang tinggi agar laku dalam konteks pasar. Nilai jual ini diperoleh melalui ketajaman keahlian dan kompetensi pribadi. Hal ini disebut sebagai semangat kompetitif.

Sekalipun demikian, semangat kompetitif yang dijalankan katekis adalah kompetitif yang bersemangatkan perjanjian. Hal ini mau mendorong katekis untuk melaksanakan profesi pastoralnya tidak sekedar mencapai standar melainkan lebih mendalami proses-prosesnya. Pendalaman terhadap proses ini disebut cinta katekis. Karya cinta yang asasi terdiri atas berkobarnya semangat untuk membuat Allah dikenal dan dicintai²³. Tujuan dari perjanjian adalah hidup abadi, bukan kebaikan duniawi. Semangat perjanjian ini ditunjukkan oleh tindakan profesional katekis yang tidak dijalankan demi

23 Marianus Telaumbanua, *Ilmu Kateketik: Hakikat dan Metode* (Jakarta: Obor, 2004), p. 174.

tujuan semata, melainkan tujuan itu akan tercapai manakala proses itu dihayati dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Konsep perjanjian itu, tidak dipandang sebagai inefisiensi dan inefektivitas dalam profesi karena penekanan utama pada "prosesnya" bukan hanya pada *input* dan *output* semata. Dengan demikian, sikap kompetitif-perjanjian ini sebenarnya suatu kelebihan yang dapat menjadi modal yang kuat bagi katekis untuk menjalani profesi pastoralnya di tengah konteks MEA.

4.2. Katekis Ekonomis-Subsidiaris

Aktivitas untuk mempertahankan hidup adalah bagian dari keberadaan manusia sebagai makhluk yang mendunia. Tindakan ekonomis sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang menurut Abraham Maslow sebagai *basic need* (kebutuhan dasar) yaitu kebutuhan manusia untuk mendapatkan sandang, pangan dan papan secukupnya²⁴. Hal ini ditegaskan pula oleh St. Paulus yang kedua kepada Jemaat di Tesalonika tentang pentingnya kerja supaya tidak menjadi beban bagi orang lain: ...tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun... jika seorang tidak mau berkerja, janganlah ia makan (2 Tes 3:8b.10b). Makan merupakan simbol kebutuhan jasmaniah manusia yang perlu untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia harus bekerja keras. Atas dasar itu, aktivitas ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia merupakan aktivitas yang mulia di hadapan Tuhan.

Aktivitas ekonomis selalu melekat erat dengan keberadaan manusia yang mendunia. Sejarah telah membuktikan bahwa kebutuhan ekonomis ini sering dianggap sebagai kebutuhan pamungkas yang harus dikejar oleh manusia di dunia ini. Secara konseptual, pandangan ini diperkuat oleh konsep materialisme historis Karl Marx. Secara praktis pun ditunjukkan oleh kecenderungan manusia untuk menjadikan kekayaan sebagai salah satu penawar kebahagiaan di muka bumi ini. Upaya ini sangat bersemayam subur dalam konsep pembangunan yang memuja kehendak bebas (*free will*) dalam berbagai bentuknya. Kehendak bebas yang dipuja ini dapat menumbuhkan semangat individualisme modern yang melalui globalisasi dan ekonomi pasar ditanam dalam masyarakat kita, membuat setiap orang menjadi

24 Jarvis, Matt, *Teori-teori Psikologi (Pendekatan modern untuk memahami perilaku, perasaan dan pikiran Manusia)* (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2007), p 95.

kastanya sendiri²⁵.

Sejarah mencatat bahwa bahaya *free will* dapat mendorong munculnya kaum-kaum bermodal (kapitalis) yang dapat memonopoli kekayaan masyarakat. Realitas ini yang mendorong refleksi kritis Karl Marx yang dinyatakan dalam teori kelas. Teori ini mengelompokan dua pemangku kepentingan dalam masyarakat ekonomi industri yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kedua kelas ini selalu bertentangan (konflik) karena keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Kaum kapitalis berusaha mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan menekan upah serendah-rendahnya pada kaum proletar. Sebaliknya, kaum buruh berkepentingan untuk mendapatkan upah setinggi-tingginya. Semua hal ini merupakan efek dari konsep liberalisme dalam ekonomi.

Bias-bias ekonomi neoliberalisme pun tetap membawa dampak kemiskinan bagi manusia sekarang ini bahkan tidak sekadar antar individu melainkan antara bangsa (*transnationality*) karena kepemilikan kekayaan yang tidak merata dan seringkali mendapatkannya dengan mengorbankan orang atau Negara lain. Hal ini yang menimbulkan ketergantungan (*dependency*) seperti yang digambarkan sangat jelas dalam teori ekonomi politik pembangunan yang disebut teori dependensi, yaitu teori yang menjelaskan ketergantungan Negara-negara dunia ketiga terhadap Negara-negara maju atau sebaliknya karena menguatnya kapitalisme transnasional (*transnational capitalist class*)²⁶.

Derivasi konseptual prinsip ekonomi liberalisme ini dikemas dalam bentuk optimisme bahwa *free trade area* dan konsep perdagangan bebas merupakan jalan emas menuju pembangunan bangsa. Menurut saya, MEA adalah salah satu bentuk neoliberalisme yang menghidupkan kembali semangat *free will* melalui penataan pembangunan Negara berasaskan kepercayaan bahwa ekonomi adalah basis pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh upaya MEA untuk menghilangkan hambatan kelembagaan seperti proteksi atau *double taxation*. Konteks ini mau tidak mau mendorong katekis untuk menjalankan profesinya secara ekonomis-subsidiaris. Melaksanakan profesi pastoral secara ekonomis berarti seorang katekis harus kreatif dan memiliki banyak keterampilan agar mampu bersaing dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN ini. Sekalipun demikian,

25 Georg Kirchberger, *Misi Evangelisasi Penghayatan Iman* (Maumere: Ledalero, 2004), p. 120.

26 Sunyoto, *Op. Cit.*, pp. 8-9.

ia mesti mengakui bahwa tindakannya ekonomisnya harus bersifat sosial, yakni harus menjadikan ekonomi sebagai media pemuliaan Allah. Ekonomi sebagai media pemuliaan Allah yakni ekonomi yang tidak menindas orang lain, melainkan dapat menghantar kita dan orang lain pada kebahagiaan (GS art. 64)²⁷.

Hal ini ditegaskan Gereja melalui pernyataan: "*Cinta kasih Gereja terhadap kaum miskin diilhami oleh Injil Sabda Bahagia, oleh kemiskinan Yesus dan oleh perhatian-Nya kepada kaum miskin. Cinta kasih ini berkenaan dengan kemiskinan materiil dan juga banyak bentuk kemiskinan budaya dan kemiskinan religious* (Kompendium Gereja Katolik, no. 184)²⁸. Penegasan ini terdorong oleh perintah Injil, "kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Mat 10:8), Gereja mengajarkan bahwa seseorang harus membantu sesamanya di dalam berbagai kebutuhannya dan memenuhi masyarakat manusia dengan *karya-karya belas kasih di bidang jasmani dan rohani yang tak terbilang banyaknya*²⁹.

4.3. Katekis Adaptif -Profetis

Katekis adalah seorang professional yang mendunia. Atas dasar itu, segala duka dan kecemasan dunia adalah bagian dari hidup dan panggilannya. Karena itu, katekis mesti beradaptasi dengan dunia. Adaptasi tidak berarti ikut arus dunia dengan meninggalkan identitasnya dan terlebur di dalam dunia. Adaptasi yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti alur-alur atau kontur-kontur dunia untuk kemudian menatanya dengan semangat Injili melalui tindakan professional katekis. Adaptasi adalah salah satu media evangelisasi di dunia modern dengan cara bersahabat dengan dunia untuk mengarahkannya pada nilai Injili.

Tindakan profetis adalah bagian dari keberadaan katekis sebagai pewarta keselamatan Tuhan di tengah dunia. Hal ini sesuai dengan penegasan ***Catechese Tradendae (1977)***, sebagai berikut: katekis adalah umat awam yang telah melalui pembentukan/kursus dan hidup sesuai dengan Injil. Katekis adalah seorang yang telah diutus oleh Gereja, sesuai dengan keperluan setempat, yang tugasnya adalah untuk membawa umat untuk lebih mengenali, mencintai dan mengikuti Yesus. Selain itu, ***Redemptoris***

27 R. Hardawiryana (penterj.) *Konsili Vatikan II*. (Obor: Jakarta, 1993), pp. 610-611.

28 Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung. 2007. *Kompendium Gereja Katolik*. Maumere: Ledalero., pp. 124-125.

29

Missio (1990): menggambarkan katekis sebagai “pelayan, saksi, penginjil dan tulang belakang kepada Komunitas Kristiani terutama bagi Gereja-Gereja yang masih muda.

Guide for Catechists (1993): menyatakan bahawa tugas katekis berkait rapat dalam tugas-tugas missionari. Mereka bukan saja berkomitmen dalam mempersiapkan umat untuk menerima sakramen-sakramen (Pembaptisan, Penguatan, pengakuan dan Ekaristi) tetapi juga sebagai saksi, dan melibatkan diri dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia, inkulturasi dan dialog.

Pernyataan di atas, hendak menegaskan bahwa seorang katekis profesional adalah katekis yang selalu berinteraksi dengan tata dunia. Katekis melaksanakan karya atau tugasnya di tengah dunia tidak hanya dengan menghindarkan atau menjauhkan diri dari dunia melainkan dengan melibatkan diri secara total dengan dunia baik kegelisahannya maupun kegembiraannya agar dapat menatanya secara mendalam (GS. No. 4)³⁰. Dengan kata lain, katekis sejati harus adaptif-profetis. Profetisitas katekis dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN dapat dilakukan melalui keterlibatan katekis untuk memberantas kemiskinan melalui kemampuan profesionalnya agar bersifat kompetitif. Kompetitif yang dimaksudkan di sini tidak berarti hanya kompetitif dalam dunia usaha atau menjadikan profesi pastoral sebagai medan kompetisi untuk meraup keuntungan yang berlimpah melainkan bagaimana menjadikan profesi pastoral sebagai sebuah profesi yang tidak kalah bersaing dengan profesi lainnya dalam melayani kebutuhan umat manusia di dunia.

4.4. Katekis Sosialis-Eskatologis

Tujuan kode etik dalam etika profesi modern adalah untuk menjaga tindakan profesi tidak semena-mena atau mengabaikan kebaikan pelayanannya. Dengan kata lain, etika profesi modern mendorong profesi melakukan tindakan yang minimum dapat mendorong atau mewujudkan kebaikan bagi masyarakat atau manusia yang dilayani dalam profesi. Upaya ini dapat disebut sebagai suatu tindakan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan orang lain. Standar kebaikan itu dapat diukur dengan standar minimal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Dengan melakukan standar pelayanan itu, suatu profesi dapat disebut sebagai profesional.

³⁰ Hardawiryana (Perterj.). *Op. Cit.*, p. 524.

Dengan kata lain, bila kecenderungan globalisasi dan neoliberalisasi melumpuhkan kesadaran sosial, maka sangat penting agar kita meningkatkan kesadaran kritis dalam masyarakat untuk melindungi korbannya. Hal ini dilakukan dengan membangkitkan kesadaran dan percaya diri masyarakat atau orang yang dilayani terhadap apa yang mereka butuhkan. Kesadaran kritis ini merupakan langkah menuju budaya solidaritas³¹. Dengan demikian, aksi professional katekis dapat memperjuangkan tidak hanya kebaikan melainkan keselamatan orang yang dilayani.

Berbeda dari cara pandang tersebut, dalam profesi katekis, seorang agen pastoral melakukan kegiatan pastoralnya harus melampaui standar pelayanan yang digariskan sebab tujuannya adalah bukan sekedar mewujudkan kebaikan masyarakat yang dilayani sesama melainkan keselamatan mereka. Penilaian tindakannya bukan tergantung pada pengakuan sosial melainkan dengan penuh iman dan harap bahwa tindakannya mendapatkan rahmat dari Tuhan. Tujuan kebaikan hanya berkaitan dengan tanggungjawab sosial tindakan profesi terhadap atasan atau masyarakat yang dinilai oleh asas-asas profesi yang telah digariskan. Pelaksanaan profesi pastoral seorang katekis tidak sekedar mengejar kebaikan itu melainkan harus terobsesi pada keselamatan eskatologis yang dimulai dari dunia ini dan yang akan disempurnakan pada kehidupan kekal (keselamatan eskatologis).

Etika profesi pada umumnya berusaha menjaga agar pelayanan profesional yang dilakukannya minimal dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat yang dilayani. Sebaliknya etika profesi katekis melakukan kegiatan professional tidak sekedar mencapai standar yang dilakukan. Itu berarti tindakan professional agen pastoral selain mengejar kebaikan juga mengejar kesematan. Apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di hadapan Allah. Atas dasar itu, tindakan profesi pastoral tidak hanya dilakukan pada standar minimal melainkan pada standar maksimal. Dengan kata lain, gerakan etika profesi pastoral diawali dengan kebaikan yang harus disempurnakan melalui obsesi dan upaya untuk mencapai keselamatan yang diberikan Tuhan sebagai rahmat bagi tindakan profesionalnya.

31 Georg Kirchberger., *Op., Cit.*, p. 123.

5. PENUTUP

Katekis adalah seorang yang menjalankan kegiatan profesi pastoral. Profesi pastoral adalah suatu bidang kegiatan yang berusaha melayani masyarakat dalam bidang kerohanian. Bidang rohani yang ditawarkan profesi pastoral adalah kegiatan kegembaan yang didasari oleh kegiatan kegembaan Yesus Kristus Sang Gembala utama yang telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan umat manusia. Mencontohi kegiatan kegembaan Yesus Sang Guru, seorang profesional pastoral harus berusaha (baik atau tidak baik waktunya) untuk menggembalakan umat beriman agar masuk dalam keselamatan Tuhan.

MEA adalah salah satu konteks yang mencakup "baik atau tidak baik waktunya". Hal ini disebabkan karena MEA adalah suatu kondisi yang mau tidak mau harus dialami oleh seluruh warga Negara anggota ASEAN. Di satu sisi, MEA adalah momen produktif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di negara-negara ASEAN ini. Di sisi lain, MEA adalah bentuk lain dari neoliberalisme yang cenderung percaya bahwa pembangunan sebuah Negara akan tercapai melalui pemberian ruang kebebasan untuk berkompetisi secara bebas. Atas dasar itu, seorang katekis yang adalah salah satu penggerak utama profesi pastoral harus senantiasa mampu bersaing dalam situasi ini sambil menatanya untuk menjadi ruang pengembangan warta gembira Tuhan. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan keahlian katekis agar lebih lebih kompetitif-perjanjian, ekonomis-subsidiaris, adaptif-profetis, dan sosialis-eskatologis.

DAFTAR RUJUKAN

Dokumen

R. Hardawiryana (penterj.) *Konsili Vatikan II* (Obor: Jakarta, 1993), pp. 610-611.

Buku-buku

Hertz, N. 2004. *Membunuh Atas Nama Kebebasan, The Silent Takeover, Kapitalisme Global Dan Kematian Demokrasi*. Bandung: Nuansa.

Fakih, Mohamad. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Navis, M. D. 2009. *Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme Atas Daulat Rakyat*. Jakarta: Inside Press.

- Abolafia, M. 1996. *Making Markets: Opportunities and Restraint on Wall Street*. Cambridge: Harvard University Press.
- Richard M. Gula, 2009. *Etika Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, Abdul dan Moh. Muhibbin. 2009. *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Telaumbanua, Marianus. 2004. *Ilmu Kateketik: Hakikat dan Metode*. Jakarta: Obor.
- Jarvis, Matt. 2007. *Teori-teori Psikologi (Pendekatan modern untuk memahami perilaku, perasaan dan pikiran Manusia)*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Kirchberger, Georg. 2004. *Misi Evangelisasi Penghayatan Iman*. Maumere: Ledalero.
-2007. *Kompendium Gereja Katolik*. Maumere: Ledalero.

Internet

- <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/overview-10>.
- Arya Baskoro dalam <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi>